



LAPORAN KINERJA (LKJ) TRIWULAN I 2026 **SUPM WAIHERU AMBON**



**PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga Laporan Kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas target dan capaian kinerja SUPM Waeheru Tahun 2026.

Metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini mempunyai fungsi untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Triwulan I Tahun 2026 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SUPM Waeheru dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja, dimana kinerja SUPM Waeheru diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran Kegiatan (SK) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) SUPM Waeheru Tahun 2026 yang merupakan kontrak kinerja Tahunan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah dicapai oleh SUPM Waeheru melalui hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Karyawan dan Karyawati SUPM Waeheru serta semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan SUPM Waeheru pada Triwulan I Tahun 2026.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 SUPM Waeheru ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, monitoring dan evaluasi serta perbaikan kegiatan dimasa-masa yang akan datang serta menjadi sarana komunikasi dan publikasi bagi kegiatan di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan khususnya SUPM Waeheru.

Ambon, 17 April 2026

Kepala SUPM Waeheru



Abdul Azis Usemahu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	vi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Potensi dan Permasalahan.....	5
E. Keragaan SDM SUPM Waeheru	7
F. Sistematika Laporan Kinerja	8

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis.....	10
B. Rencana Kerja Tahun 2026.....	14
C. Perjanjian Kinerja (PK) SUPM Waeheru	15
D. Pengukuran Kinerja	16

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerja Utama	17
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	18
C. Akuntabilitas Keuangan	30
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber daya	34

PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama.....	35
B. Permasalahan dan Rekomendasi.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2026	15
Tabel 2	Perbandingan target dan capaian indikator kinerja utama Triwulan I Tahun 2026.....	19
Tabel 3	Capaian IKU 1 Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja	21
Tabel 4	Data Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja	21
Tabel 5	Perbandingan Capaian IKU Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja dengan SUPM Lain	22
Tabel 6	Capaian IKU 5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru.....	25
Tabel 7	Perbandingan Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru dengan SUPM lain.....	26
Tabel 8	Capaian IKU 9 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru.....	28
Tabel 9	Perbandingan Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru dengan SUPM lain	29
Tabel 10	Realisasi Anggaran per Jenis Belanja pada Triwulan I Tahun 2026.....	31
Tabel 11	Realisasi Anggaran Per IKU dan efisiensi anggaran SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2026.....	32
Tabel 12	Perbandingan target dan capaian indikator kinerja utama dengan capaian TW I Tahun 2026	36

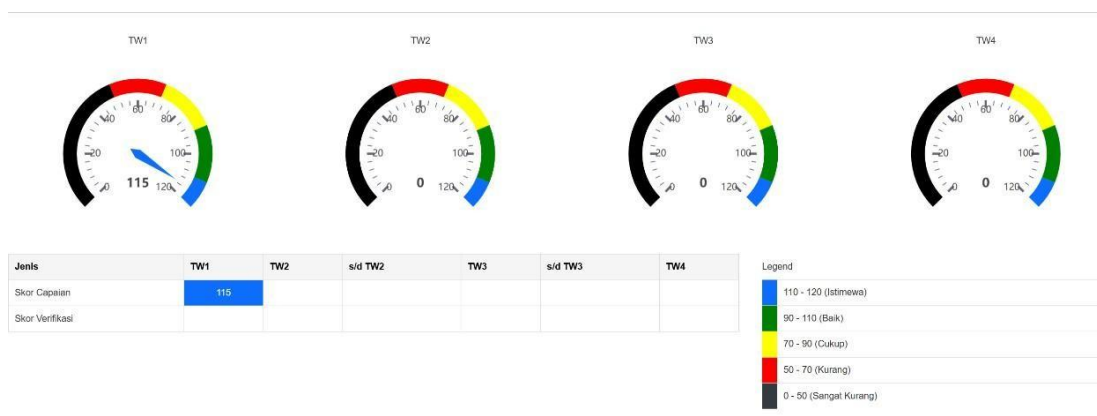
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dashboard Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026	vi
Gambar 2	Struktur Organisasi SUPM Waeheru	4
Gambar 3	SOTK Operasional SUPM Waeheru Tahun 2026	4
Gambar 4	Keragaan SDM menurut status kepegawaian	7
Gambar 5	Keragaan SDM menurut pangkat dan golongan	7
Gambar 6	Keragaan SDM menurut tingkat pendidikan	8
Gambar 7	Keragaan SDM menurut Gender	8
Gambar 8	Dashboard Utama Aplikasi kinerjaku Triwulan I Tahun 2026.....	17
Gambar 9	Capaian Kinerja SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2026 pada web kinerjaku.kkp.go.id	18
Gambar 10	Dashboard Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026	35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, SUPM Waeheru memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi KKP melalui kegiatan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pemberian pelajaran dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan; pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler; pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa; pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, orang tua siswa, dan masyarakat; pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga perlengkapan.

Pada tanggal 6 Januari Tahun 2026 SUPM Waeheru telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala SUPM Waeheru dengan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sehingga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator atau disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Aplikasi Kinerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2026 sebesar 115 yang dapat dilihat pada dashboard aplikasi kinerjaku sebagai berikut:



Sumber Data : <https://kinerjaku.kkp.go.id> (Diakses pada tanggal, 15 Januari 2026)

Gambar 1. Dashboard Aplikasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Secara umum capaian kinerja SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2026 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama tersebut, terdapat 3 (tiga) IKU yang telah terealisasi antara lain:

- 1) Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di dunia usaha, dunia industri dan/atau dunia kerja dengan capaian realiasi sebanyak 8 orang dengan presentase sebesar 120%, dari target Triwulan I yang ditetapkan sebanyak 6 orang;
- 2) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru dengan capaian realiasi sebesar 100% dengan presentase 100%, dari target Triwulan I yang ditetapkan sebesar 86%;
- 3) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru dengan capaian realiasi sebesar 100% dengan presentase 120%, dari target Triwulan I yang ditetapkan sebesar 77%.

Selain itu kinerja keuangan SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan realisasi anggaran sebesar **Rp.3.314.072.357,-** atau **21,71%** dari total pagu anggaran yang tersedia pada DIPA SUPM Waeheru sebesar **Rp. 14.495.979.000,-**.

Adapun upaya perbaikan di tahun mendatang dalam hal menjamin ketepatan sasaran pada IKU dengan periode tahunan, diperlukan pengawasan di setiap jenjang kegiatan. Langkah ini untuk memastikan bahwa target tidak hanya tercapai secara kuantitas di akhir tahun, tetapi juga memiliki kualitas yang lebih baik melalui pemantauan progres yang terukur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Tugas Dan Fungsi
 - D. Potensi Dan Permasalahan
 - E. Keragaan SDM
 - F. Sistematika Laporan Kinerja
- 

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan

dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan advanced technology; dan
3. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut SUPM Waeheru berkontribusi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah. SUPM Waeheru sebagai salah satu instansi

pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja SUPM Waeheru dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja SUPM Waeheru ini merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai diperhitungkan atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SUPM Waeheru dalam rangka mewujudkan good government, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan SUPM Waeheru.

B. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja SUPM Waeheru ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan I Tahun 2026.
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap urusan/bagian di SUPM Waeheru.
3. Sebagai umpan balik (Feedback) dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi SUPM Waeheru untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, SUPM Waeheru sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan dibidang perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekolah Usaha Perikanan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
- b. Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa dibidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program keahlian yang ditetapkan;
- c. Pelaksanaan kegiatan kokurikuler; Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;

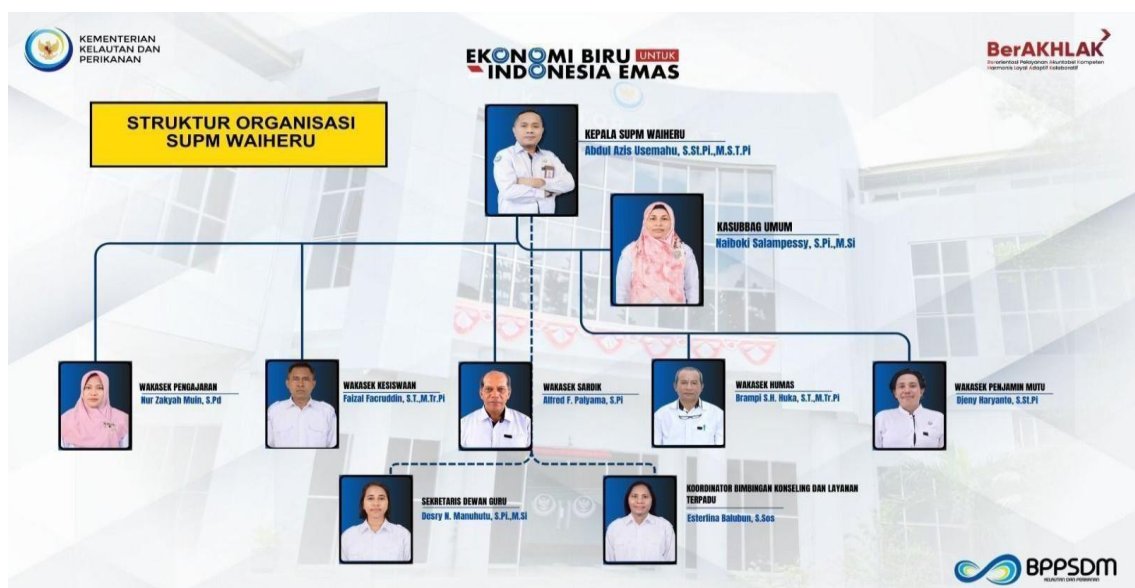
- f. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa, dan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi SUPM Waeheru sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi SUPM Waeheru

Mengingat luas dan besarnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh SUPM Waeheru, maka struktur organisasi di atas belum sepenuhnya menunjang kelancaran tugas operasional di lapangan. Oleh sebab itu kepala SUPM Waeheru sesuai dengan batas kewenangan membuat struktur organisasi sebagai operasional kegiatan SUPM Waeheru yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala SUPM Waeheru Nomor : 01/BPPSDM.SUPM-WHR/OT.210/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja SUPM Waeheru Tahun 2026, sebagai berikut:



Gambar 3. SOTK Operasional SUPM Waeheru Tahun 2026

D. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Sumberdaya Perikanan di Indonesia sangat memadai khususnya pada daerah-daerah yang merupakan wilayah kerja SUPM Waeheru, namun SDM pelaku utama bidang kelautan dan perikanan masih memiliki kualifikasi yang sangat terbatas, sehingga memerlukan peningkatan pendidikan dan keterampilan dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilakukan melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendukung peran strategis dimaksud, SUPM Waeheru memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga fungsional sebanyak 34 orang dan tenaga teknis dan administrasi sebanyak 46 orang. Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilakukan sistem pembelajaran dengan menggunakan pendekatan teaching factory 70% praktek dan 30% teori. SUPM Waeheru menerima peserta didik dari anak pelaku utama perikanan sebesar 50% pada Tahun 2020, serta penerimaan peserta didik pada Tahun 2021, 2022 menjadi 55% serta tahun 2024 dan 2025 menjadi 100% anak pelaku utama perikanan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan SUPM Waeheru memiliki 4 (Empat) program keahlian unggulan serta membekali lulusan dengan sertifikat keahlian sebagai berikut :

- 1) Program Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan dibekali dengan sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) tingkat II yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan DPKP/PUKP-KAPIN Wilayah VII Ambon, Sertifikat Basic Safety Training (BST), Buku Pelaut, serta Sertifikat Kompetensi Bidang Penangkapan Ikan dari LSP.
- 2) Program Keahlian Teknik Kapal Penangkap Ikan dibekali dengan sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) tingkat II yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan DPKP/PUKP-KAPIN Wilayah VII Ambon, Sertifikat Basic Safety Training (BST), Buku Pelaut, serta Sertifikat Kompetensi Bidang Permesinan Kapal Penangkap Ikan dari LSP.
- 3) Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan dibekali dengan Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) dan Sertifikat Asisten Pengolah Ikan (API) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sertifikat kompetensi Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dari LSP.

- 4) Program Keahlian Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut dibekali dengan Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), dan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sertifikat kompetensi Bidang Budidaya Perikanan dari LSP.

Selain itu SUPM Waeheru telah ditunjuk sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan juga sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak I (LSP-P1) SUPM Waeheru yang melakukan uji kompetensi keahlian serta menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta didik SUPM Waeheru, SMK Kelautan dan Perikanan dan Masyarakat.

b. Permasalahan

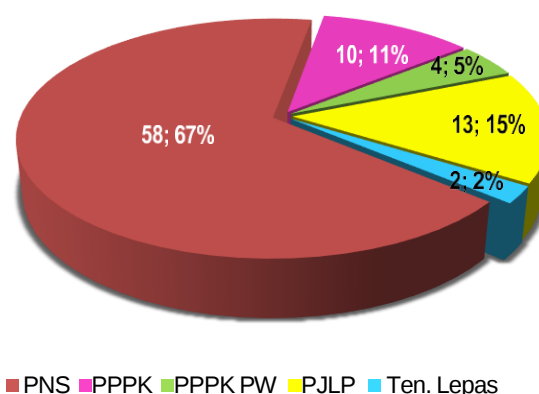
Masalah dan tantangan yang dihadapi SUPM Waeheru dalam pelaksanaan program penyelenggaraan pendidikan untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2026 antara lain:

- 1) Capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang kompeten sering tidak mencapai target karena adanya peserta didik yang mengundurkan diri atau dikeluarkan karena hukuman disiplin sehingga berpengaruh terhadap persentase capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2026.
- 2) Belum optimalnya link and match instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI) untuk meningkatkan kapasitas SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (resource sharing) dan serapan lulusan;
- 3) Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pendidikan KP sebagai instrumen penjaminan mutu dan pengembangan SDM sehingga diperlukan peran serta SUPM Waeheru dalam mendukung dan memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan tersebut;
- 4) Sarana dan prasarana pendidikan di SUPM Waeheru belum sepenuhnya terstandar sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI) serta Kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang juga belum sepenuhnya memadai untuk mendukung peningkatan kompetensi peserta didik dan kinerja organisasi.

E. Keragaan SDM SUPM Waeheru

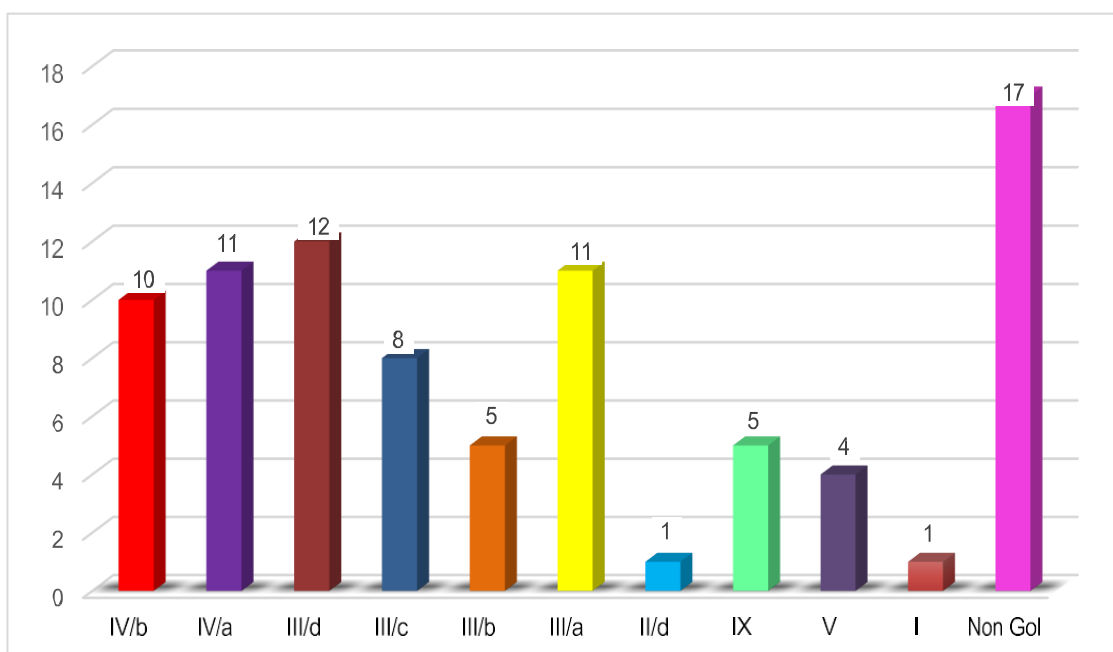
SUPM Waeheru memiliki Jumlah pegawai sampai dengan 31 Maret 2026 sebanyak 72 orang, yang diantaranya PNS sebanyak 58 orang, PPPK Penuh Waktu sebanyak 10 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 4 orang. Selain itu juga tersedia tenaga PJLP sebanyak 13 orang dan tenaga lepas sebanyak 2 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 53 orang atau 67 % Laki-laki dan 26 atau 33 % perempuan. Keragaan SDM SUPM Waeheru dibedakan dalam berbagai kategori sebagai berikut :

1. Keragaan SDM menurut status kepegawaian



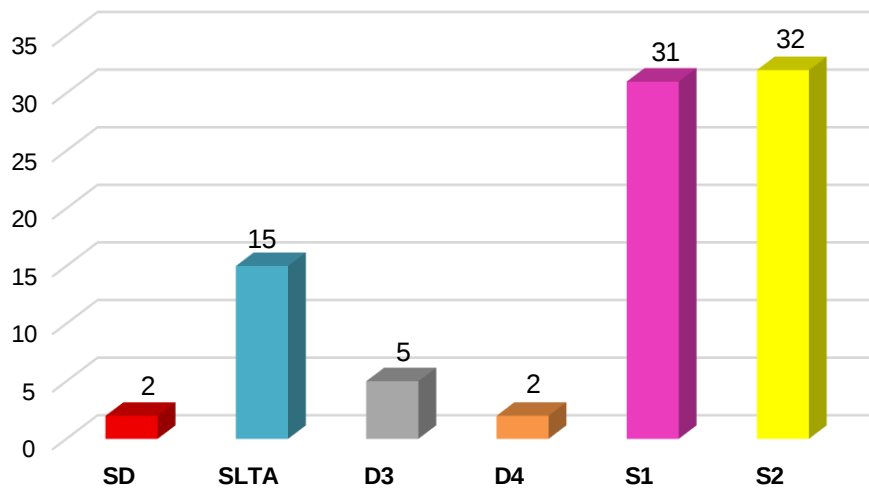
Gambar 4. Keragaan SDM menurut status kepegawaian

2. Keragaan SDM ASN dan Non ASN menurut pangkat dan golongan



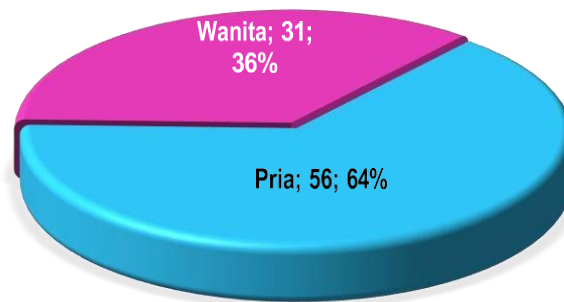
Gambar 5. Keragaan SDM menurut pangkat dan golongan

3. Keragaan SDM ASN dan Non ASN menurut Tingkat Pendidikan



Gambar 6. Keragaan SDM menurut Tingkat Pendidikan

4. Keragaan SDM Menurut Gender



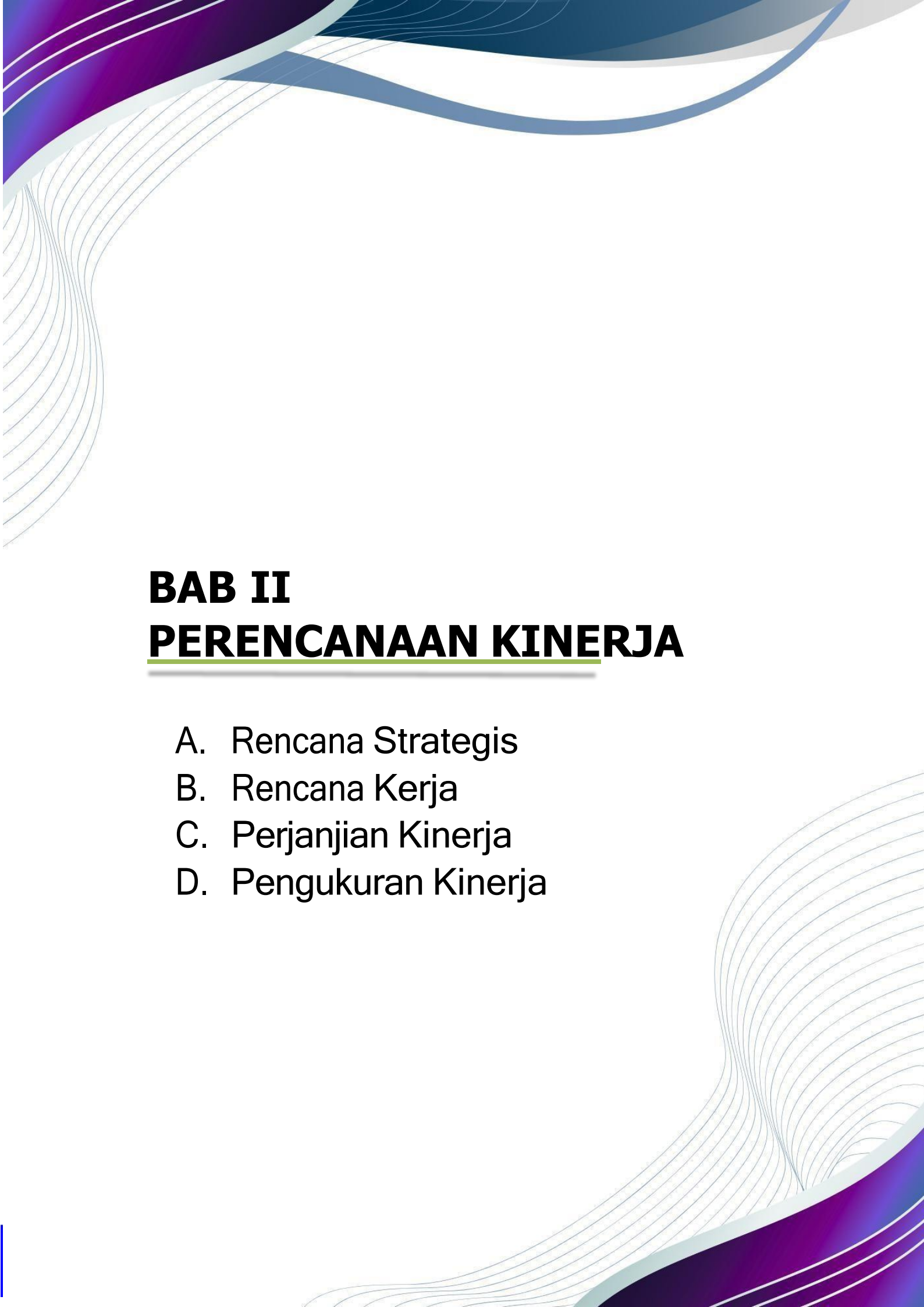
Gambar 7. Keragaan SDM menurut Gender

F. Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang SUPM Waeheru seperti tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di SUPM Waeheru.

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis SUPM Waeheru 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja SUPM Waeheru Tahun 2026 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian IKU dari indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai capaian indikator kinerja lainnya, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Pengukuran Kinerja

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) 2025-2029 sesuai dengan peraturan Kepala BPPSDM KP Nomor 25 Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM KP, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 -2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

SUPM Waeheru sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, maka SUPM Waeheru mendukung BPPSDM KP melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) **“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 2) **“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

- 1) Menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan;
- 2) Memperluas akses pendidikan dengan berbasis digital/teknologi (e-learning) bagi anak pelaku utama di SUPM Waeheru;

- 3) Menjadikan SUPM Waeheru sebagai rujukan (center of excellence) bagi SMK KP yang ada di wilayah kerjanya;
- 4) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM secara efektif dan efisien;
- 5) Mewujudkan ASN yang professional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan KKP; serta
- 6) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di SUPM Waeheru dalam rangka mendukung kinerja Reformasi Birokrasi KKP

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 “Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten”. Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM KP menjabarkan kedalam Sasaran program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

SP-1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator :

1. Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja
2. Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja
3. Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya

SP-2 : Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat, dengan indikator :

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat
2. Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Hasil Kelautan dan Perikanan
3. Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan

SP-3 : Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator :

1. Aparatur Penyelenggaran Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya

2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
3. Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya
4. Lembaga Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi
5. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

SP-4 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDM KP, dengan indikator :

1. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)

Dengan memperhatikan Sasaran Program BPPSDM KP dimaksud, maka sasaran Kegiatan yang akan dicapai Pusat Pendidikan KP pada Tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran Kegiatan BPPSDM KP adalah sebagai berikut:

- 1) SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
- 2) SK2 Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan
- 3) SK3 Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di Lingkup Pendidikan Kelautan dan Perikanan
- 4) SK4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar
- 5) SK5 Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan
- 6) SK6 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

SUPM Waeheru sebagai UPT Pusat dibawah Pusdik KP mengacu pada sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pusdik KP pada Januari 2026 yaitu :

- 1) SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten.
- 2) SK2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi sasaran Kegiatan Pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten", sesuai dengan indikator kinerja:

- 1) Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja 90 orang pada Tahun 2026;
- 2) Jumlah kerjasama SUPM Waeheru di tahun berjalan 1 kesepakatan pada Tahun 2026;

- 3) Jumlah pendidik SUPM Waeheru yang lulus sertifikasi profesi 1 orang pada Tahun 2026;
- 4) Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Waeheru 80% pada Tahun 2026.

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome SUPM Waeheru melalui Sasaran Kegiatan kedua (SK-2) "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan", dan sesuai dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru dengan target 86% pada Tahun 2026;
- 2) Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru dengan target Nilai 82 pada Tahun 2026;
- 3) Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru dengan target Indeks 85 pada Tahun 2026;
- 4) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Waeheru dengan target Nilai 71 pada Tahun 2026;
- 5) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru dengan target 77% pada Tahun 2026;
- 6) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru dengan target Nilai 92,1 pada Tahun 2026;
- 7) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru dengan target Nilai 71,75 pada Tahun 2026.

B. Rencana Kerja Tahun 2026

Sebagai Komitmen nyata dalam mencapai visi, misi dan sasaran strategis, SUPM Waeheru menetapkan rencana kerja Tahunan yang berfokus pada Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Guna mewujudkan target kinerja yang optimal, program tersebut dibagi ke dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen. Seluruh indikator kinerja SUPM Waeheru dikelola dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp.15.263.878.000,- (Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Program Direktif Presiden dengan anggaran Rp.710.124.000,-
2. Akreditasi Lembaga dengan anggaran Rp.3.500.000,-
3. Sertifikasi Profesi dan SDM dengan anggaran Rp.3.500.000,-

4. Sarana Bidang Pendidikan dengan anggaran Rp.398.998.000,-
5. Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan dengan anggaran Rp.4.014.213.000,-
6. Layanan Umum dengan anggaran Rp.900.000,-
7. Layanan Perkantoran dengan anggaran Rp.10.131.243.000,-
8. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan anggaran Rp.1.400.000,-

C. Perjanjian Kinerja (PK) SUPM Waeheru

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam bidang pendidikan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan disahkan pada Tanggal 06 Januari 2026 antara Kepala SUPM Waeheru dengan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sehingga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama.

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1 Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	90
		2 Jumlah kerjasama SUPM Waeheru di tahun berjalan (Kesepakatan)	1
		3 Jumlah pendidik SUPM Waeheru yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	1
		4 Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Waeheru (%)	80
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)	86
		6 Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)	82
		7 Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)	85
		8 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Waeheru (Nilai)	71
		9 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)	77
		10 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	92,1
		11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	71,75

D. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja SUPM Waeheru Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi pada Indikator Kinerja Utama dan akan diperoleh indeks capaian IKU. Perhitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

- 1) Angka maksimum adalah lebih dari 120;
- 2) Angka minimum adalah kurang dari 70;
- 3) Formula perhitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



Pengukuran kinerja dilakukan dengan Perangkat Lunaka berbasis Aplikasi Kinerjaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada website <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

2. Metode Pengukuran Kinerja

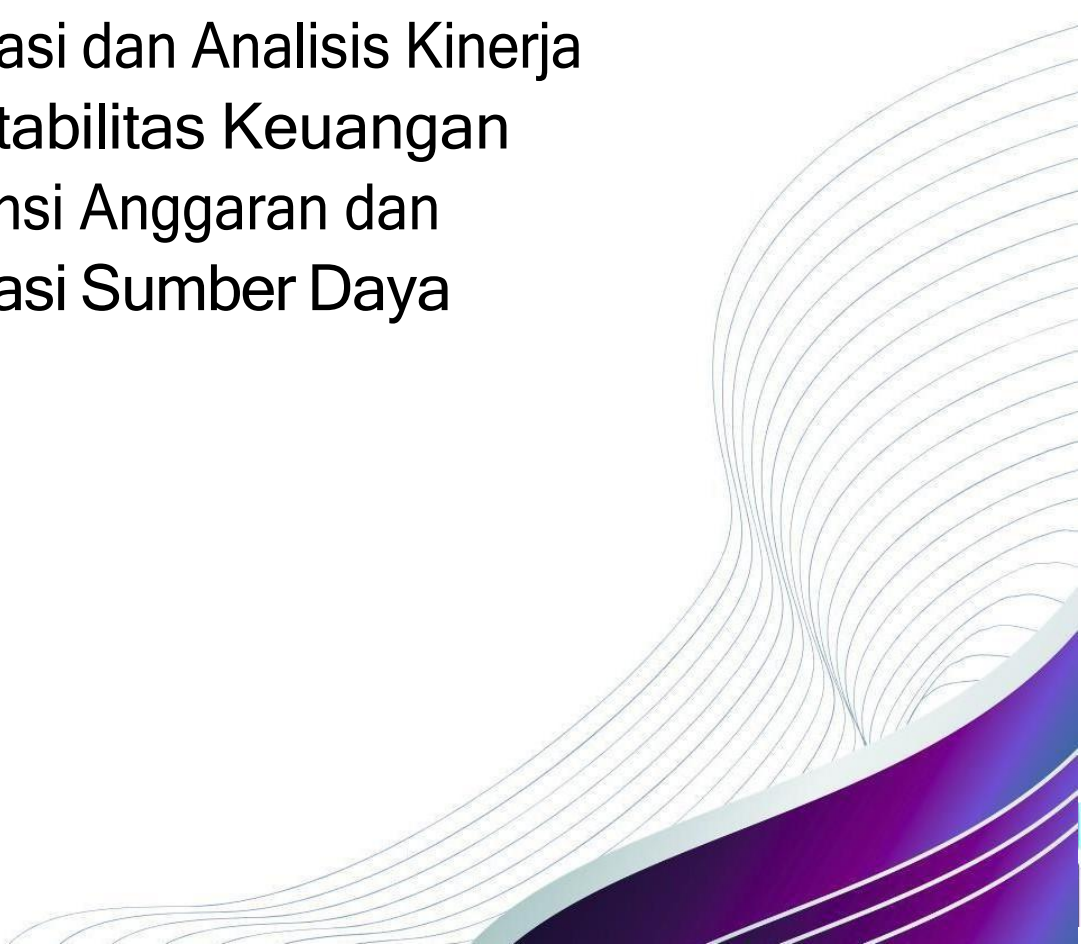
Metode pengukuran kinerja SUPM Waeheru dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulan), yaitu pada bulan maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Pengukuran dan pelaporan kinerja dilakukan oleh Tim yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala SUPM Waeheru Nomor B.97/SUPM.AMB/KP.440/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja SUPM Waeheru Tahun 2026.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Aplikasi Kinerjaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada portal <http://kinerjaku.kkp.go.id>. yang kemudian hasil pengukurannya dijabarkan oleh tim pengelola laporan kinerja dalam bentuk laporan kinerja Triwulan dan Tahunan beserta data dukungnya untuk disampaikan kepada Kepala SUPM Waeheru sebagai penanggung jawab kegiatan yang selanjutnya dilaporkan kepada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan serta Sekretaris BPPSDM Kelautan dan Perikanan.



BAB III

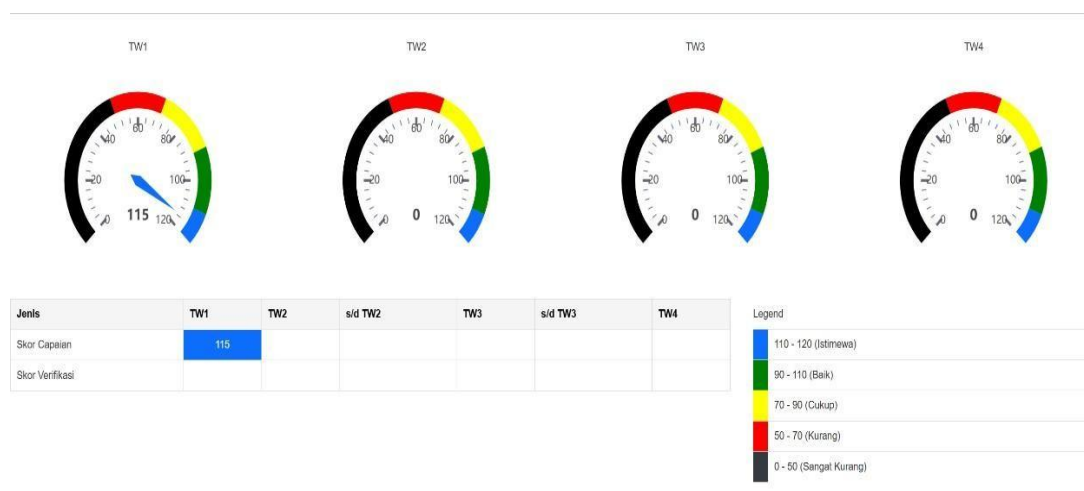
AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Prestasi IKU
 - B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
 - C. Akuntabilitas Keuangan
 - D. Efisiensi Anggaran dan
Alokasi Sumber Daya
- 

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator atau disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Aplikasi Kinerjaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2026 sebesar 115 yang dapat dilihat pada dashboard aplikasi kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 8. Dashboard Utama Aplikasi kinerjaku Triwulan I Tahun 2026

Sumber Data : <https://kinerjaku.kkp.go.id> (diakses pada tanggal 15 Januari 2026)

Pada Tahun 2026 SUPM Waeheru memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja sudah ditetapkan, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 3 (tiga) IKU yang terealisasi dengan capaian Kinerja berstatus **Istimewa** dan **baik**. Detail capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada gambar tangkapan layar dari aplikasi kinerjaku sebagai berikut :

Gambar 9. Capaian Kinerja SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2026 pada web kinerjaku.kkp.go.id

NKO Maret - 2026 Download

Unit Kerja : SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU

Skor Kinerja : **115.00**

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten						120,00			120,00		
IKSK.01.01	Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang) Data Dukung1 Tambah Data Dukung+	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90,00	6,00	8,00	120,00	6,00	8,00	120,00	14-Apr-2026 10:29
IKSK.01.02	Jumlah Kerjasama SUPM Waeheru di tahun berjalan (Kesepakatan) Tambah Data Dukung+	Kesepakatan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 10:29
IKSK.01.03	Jumlah Pendidik SUPM Waeheru yang lulus sertifikasi Profesi (Orang) Tambah Data Dukung+	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 10:29
IKSK.01.04	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Waeheru (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 10:29
S.02	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						110,00			110,00		
IKSK.02.01	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%) Data Dukung1 Data Dukung2 Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	86,00	100,00	86,00	86,00	100,00	14-Apr-2026 10:29
IKSK.02.02	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 10:29
IKSK.02.03	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks) Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 10:29
IKSK.02.04	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Waeheru (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 10:29
IKSK.02.05	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%) Data Dukung1 Data Dukung2 Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,00	77,00	100,00	120,00	77,00	100,00	120,00	14-Apr-2026 10:29
IKSK.02.06	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (SUPM) Waeheru (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,10	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 10:29
IKSK.02.07	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 10:29

sumber : www.kinerjaku.kkp.go.id

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja sesuai dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tara Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SUPM Waeheru. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari

suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis SUPM Waeheru yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2026 dapat tercapai. Capaian Indikator Kinerja Utama pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1 Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	6	8	120
	2 Jumlah kerjasama SUPM Waeheru di tahun berjalan (Kesepakatan)	-	-	-
	3 Jumlah pendidik SUPM Waeheru yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	-	-	-
	4 Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Waeheru (%)	-	-	-
2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)	86	100	100
	6 Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)	-	-	-
	7 Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)	-	-	-
	8 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Waeheru (Nilai)	-	-	-
	9 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)	77	100	120
	10 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	-	-	-
	11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	-	-	-

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 1

Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)

Pendidikan merupakan suatu media yang penting dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk tujuan pembangunan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perubahan dan perkembangan masyarakat ke arah yang lebih kompleks yang menuntut masyarakat untuk bisa mengimbangi kemajuan tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui sektor pendidikan yang mengacu pada kebutuhan individu dan pembangunan. Mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan peran suatu lembaga pendidikan.

Sebagai salah satu satuan pendidikan menengah lingkup KKP, SUPM Waeheru terus mengembangkan dan memaksimalkan potensi peserta didik melalui proses belajar mengajar vokasional dengan pendekatan teaching factory (TEFA) yakni 70% praktik dan 30% teori. Pendidikan kerja (vocational education) adalah pendidikan yang mempersiapkan karir dengan pekerjaan atau bidang teknis tertentu. Dengan kata lain, pendidikan kejuruan dapat membuktikan bahwa pendidikan taraf sekolah menengah tingkatan juga dapat secara langsung menjadi penghubung dengan dunia kerja.

Program pembelajaran tersebut diharapkan agar lulusan SUPM Waeheru dapat terserap pada dunia industri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Lulusan yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi serta ijazah sebagai syarat untuk melamar kerja pada perusahaan-perusahaan, sehingga pihak sekolah telah melakukan pendekatan dengan berbagai perusahaan agar dapat memudahkan dan menerima lulusan untuk segera dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Tingkat serapan yang tinggi menunjukkan bahwa kurikulum, kompetensi lulusan, serta proses pembelajaran telah selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi sektor KP.

Pada Tahun 2026 SUPM Waeheru, lulusan SUPM Waeheru yang telah bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri Dalam dan luar Negeri sebanyak 8 Orang.

Tabel 3. Capaian IKU 1: Lulusan SUPM Waeheru yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten											
IKU 1 : Lulusan SUPM Waeheru yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)											
Realisasi TW I					2026				RK SUPM Waeheru 2025 –2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
-	-	-	-	-	6	8	120	-	85	9,41	

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2026 Indikator Kinerja Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja ditargetkan adalah 6 orang dan capaian yang diperoleh sebanyak 8 orang atau 120%. Capaian ini sebagaimana disampaikan melalui Surat Kepala SUPM Waeheru Nomor : B.1733/SUPM.AMB/RC.610/IV/2026 tanggal 7 April 2026 tentang Data Capaian IKU Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang). Jika dibandingkan dengan target 2029 yang tertuang dalam Rancangan Indikator dan Target Kinerja SUPM Waeheru 2025-2029 sebanyak 85 orang dengan persentase capaian adalah 9,41%.

IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2025, dikarenakan untuk capaian kinerja Tahun 2025 diukur dalam periode tahunan.

Tabel 4. Data Lulusan SUPM Waeheru yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja

JENJANG PENDIDIKAN	SERAPAN LULUSAN										JUMLAH		
	DUDI DN		DUDI LN		Trainee		Wirausaha		Non Bidang KP			Instansi Pemerintah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P
Politeknik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SUPM	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
JUMLAH	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	8		-		-		-		-		-		

Data di atas menunjukkan tingkat partisipasi serapan lulusan yang dihitung pada Triwulan I tahun 2026 semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Faktor Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut adalah sistem pendataan alumni yang terlaksana dan terorganisir di SUPM Waeheru. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain adalah :

- 1) Kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan disusun dan diperbarui secara

berkala dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri;

- 2) Kerjasama antara SUPM Waeheru dengan perusahaan sektor KP dalam memprioritaskan lulusan SUPM Waeheru untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain perusahaan sektor KP baik di Maluku maupun di luar Maluku, kerjasama antara SUPM Waeheru dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) juga dijalin dalam rangka menyiapkan tenaga kerja lulusan SUPM Waeheru yang kompeten agar dapat bekerja luar negeri;
- 3) SUPM Waeheru aktif melakukan penelusuran lulusan dan pendampingan kepada lulusan agar bisa segera bekerja.

Perbandingan capaian Indikator antara SUPM Waeheru dan UPT pendidikan Menengah Pusat pendidikan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU Lulusan SUPM Waeheru yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja dengan SUPM Lain

NO	Unit Kerja	Target IKU (Orang)	Capaian IKU (Orang)	Persentase Capaian (%)
1	SUPM Ladong Aceh	4	5	120,00
2	SUPM Pariaman	7	10	120,00
3	SUPM Kota Agung	4	5	120,00
4	SUPM Tegal	8	8	100,00
5	SUPM Pontianak	-	-	-
6	SUPM Waeheru	6	8	120,00
7	SUPM Sorong	-	-	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai capaian IKU ini yang diperoleh oleh sebagian besar SUPM lingkup KKP sebesar 120%, akan tetapi SUPM Tegal hanya memperoleh capaian sebesar 100%.

Indikator Kinerja Utama 2

Jumlah kerjasama SUPM Waeheru di tahun berjalan (kesepakatan)

Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/organisasi lainnya yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/UPT lingkup. Kerja sama SUPM Waeheru adalah penyelenggaraan kerja sama antara SUPM Waeheru dengan pihak mitra pada tahun berjalan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi:

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK;
2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan;
3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian;

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang;
5. Diseminasi dan publikasi;
6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama;
7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indikator ini menunjukkan jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pendidikan di SUPM Waeheru.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan IKU tahunan sehingga capaian kinerjanya akan diukur pada triwulan IV Tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama 3

Jumlah Pendidik SUPM Waeheru yang Lulus Sertifikasi Profesi (Orang)

Menurut UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.

Tenaga kependidikan sendiri menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 dan pasal 39 adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan. Tenaga Pendidikan bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada satuan Pendidikan. Pendidik (guru dan dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pendidik akan menunjukkan kualitas pendidik dalam mengajar, sehingga akan mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas, mempengaruhi peserta didik untuk menerima dan menyerap pelajaran yang diberikan. Kompetensi yang diperlukan oleh seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan IKU tahunan sehingga capaian kinerjanya akan diukur pada triwulan IV Tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama 4**Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya di SUPM Waeheru (%)**

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya.

Selain sarana pendidikan, fasilitas/prasarana pendidikan juga merupakan factor penunjang dalam suatu penyelenggaraan pendidikan. Prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan IKU tahunan sehingga capaian kinerjanya akan diukur pada triwulan IV Tahun 2026.

Sasaran Kegiatan 2**Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan****Indikator Kinerja Utama 5****Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja SUPM Waeheru (%)**

IKU ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025 dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret 2026 (Triwulan I tahun 2026).

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LK SUPM Waeheru merupakan hasil pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 6. Capaian IKU 5 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru

Sasaran Kegiatan 2 : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan											
IKU 5 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)											
Realisasi TW I					2026				RK SUPM Waeheru 2025 –2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
100	100	100	100	100	86	100	100	-	85	117,65	

Tabel diatas menunjukkan realisasi capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100%. Capaian ini sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris BPPSDM Nomor : B.1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tanggal 14 April 2026 tentang Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2026 Lingkup BPPSDM KP". Capaian IKU ini sama dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 2029 yang tertuang dalam Rancangan Indikator dan Target Kinerja SUPM Waeheru 2025-2029 sebesar 85% dengan persentase capaian adalah 117,65%.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan dokumennya telah dilengkapi dan disampaikan. Faktor Keberhasilan pencapaian IKU ini merupakan keberhasilan atas pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan, serta pendampingan penyelesaian tindaklanjut temuan yang dilakukan oleh tim Itjen KKP. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah :

1. Adanya kerja sama yang baik antar semua pihak terkait dalam mengikuti dan menyelesaikan temuan dari hasil pemeriksaan Itjen KKP.
2. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal yang berjalan dengan baik

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini yakni seluruh pegawai SUPM Waeheru yang terlibat dalam pelayanan keuangan dapat menjalankan tugasnya secara baik dan tepat waktu.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah pelayanan keuangan dimana proses administrasi pertanggungjawaban keuangan berlangsung, serta terdapat perbaikan pelayanan keuangan dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan SUPM Waeheru.

Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja SUPM Waeheru dengan SUPM Lain

NO	Unit Kerja	Target IKU (%)	Capaian IKU (%)	Persentase Capaian (%)
1	SUPM Ladong Aceh	86	100	100,00
2	SUPM Pariaman	86	100	100,00
3	SUPM Kota Agung	86	100	100,00
4	SUPM Tegal	86	100	100,00
5	SUPM Pontianak	86	100	100,00
6	SUPM Waeheru	85	100	100,00
7	SUPM Sorong	86	100	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai capaian IKU ini yang diperoleh oleh seluruh SUPM lingkup KKP memiliki nilai capaian yang sama sebesar 100%.

Indikator Kinerja Utama 6

Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan IKU tahunan sehingga capaian kinerjanya akan diukur pada triwulan IV Tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama 7

Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru merupakan Indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan

gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan IKU tahunan sehingga capaian kinerjanya akan diukur pada triwulan IV Tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama 8

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Waeheru (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan IKU tahunan sehingga capaian kinerjanya akan diukur pada triwulan IV Tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama 9

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 8. Capaian IKU 9 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru

Sasaran Kegiatan 2 : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan IKU 9 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)										
Realisasi TW I					2026				RK SUPM Waeheru 2025 –2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	100	77	100	120	-	80	125,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2026 Indikator Kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru ditargetkan dengan 77% dan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian adalah 120%. Capaian ini sebagaimana merujuk Nota Dinas Sekretaris BPPSDM KP Nomor : 1428/BPPSDM.1/PL.410/IV/2026 tanggal 13 April 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan I TA. 2026. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena IKU ini baru ada pada tahun 2025 dan capaian yang diperoleh sama dengan pada Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 yang tertuang dalam Rancangan Indikator dan Target Kinerja SUPM Waeheru 2025-2029 sebesar 80%, maka persentase capaian adalah 125,00%.

Faktor-faktor keberhasilan pengadaan barang/jasa (PBJ) yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru mencakup :

1. Rencana pengadaan harus disusun dengan cermat, termasuk spesifikasi teknis yang jelas, perkiraan biaya yang akurat, dan jadwal pelaksanaan yang realistis. Perencanaan yang baik ini kemudian diumumkan secara tepat waktu di SIRUP, yang dapat diakses di portal resmi SIRUP LKPP;
2. Pengumuman di SIRUP memastikan transparansi proses dari awal (perencanaan) hingga akhir (pelaksanaan dan pelaporan). Hal ini memungkinkan pemantauan

- publik dan menghindari praktik korupsi atau kolusi, yang secara langsung meningkatkan kepercayaan dan keberhasilan pengadaan;
3. Pemilihan metode pengadaan (misalnya, tender, pengadaan langsung, atau e-purchasing) yang sesuai dengan karakteristik barang/jasa dan nilai paket pengadaan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 4. Keterlibatan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan, sangat penting untuk mengelola proses pengadaan dengan benar;
 5. Pengelolaan kontrak yang baik setelah penandatanganan, termasuk pengawasan mutu dan jadwal, memastikan hasil pengadaan sesuai dengan yang direncanakan dan diumumkan di awal.

Kegiatan yang menunjang Keberhasilan capaian 120% pada IKU ini ditunjang secara penuh oleh pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen, khususnya pada komponen Perencanaan, Penganggaran, dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

Alokasi anggaran dieksekusi secara efektif untuk membiayai operasional pengelola keuangan, honorarium perangkat PBJ, serta penyelenggaraan rapat koordinasi internal penyusunan RUP. Efisiensi penyelenggaraan kegiatan manajemen ini memastikan seluruh roda administrasi pengadaan di SUPM Waeheru, mulai dari belanja bahan praktik, pemeliharaan aset, hingga modal, memiliki legalitas perencanaan yang transparan dan dapat diakses oleh publik.

Perbandingan capaian Indikator antara SUPM Waeheru dan UPT Pendidikan Menengah Pusat pendidikan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru dengan SUPM Lain

NO	Unit Kerja	Target IKU (Nilai)	Capaian IKU (Nilai)	Persentase Capaian (%)
1	SUPM Ladong Aceh	77	100	120,00
2	SUPM Pariaman	77	100	120,00
3	SUPM Kota Agung	77	100	120,00
4	SUPM Tegal	77	100	120,00
5	SUPM Pontianak	77	100	120,00
6	SUPM Waeheru	77	100	120,00
7	SUPM Sorong	77	100	120,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP oleh seluruh SUPM lingkup KKP mencapai nilai maksimal sebesar 120%.

Indikator Kinerja Utama 10**Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)**

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Devisiasi RDP Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan Capaian Output.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan IKU tahunan sehingga capaian kinerjanya akan diukur pada triwulan IV Tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama 11**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)**

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKAKL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya keadaan kebijakan Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan IKU tahunan sehingga capaian kinerjanya akan diukur pada triwulan IV Tahun 2026.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi pagu anggaran SUPM Waeheru tahun 2026 sebesar **Rp.15.263.878.000**, yang terdiri dari anggaran kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.5.130.335.000, dan anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP sebesar Rp.10.133.543.000,. Adapun penyerapan anggaran SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2026 per jenis

belanja dan jenis kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja pada Triwulan I Tahun 2026

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi OMSPAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai (51)	8.520.269.000	2.547.130.331	29,89
2	Belanja Barang (52)	6.344.611.000	766.942.026	12,09
3	Belanja Modal (53)	398.998.000	-	-
TOTAL		15.263.878.000	3.314.072.357	21,71

Sumber : <https://myintress.kemenkeu.go.id> (Diakses pada tanggal, 15 Januari 2026)

Total anggaran SUPM Waeheru Tahun 2026 sebesar Rp.15.263.878.000 yang terdiri Rupiah Murni sebesar Rp.14.864.880.000, dan PNPB TA Berjalan sebesar Rp.398.998.000. Untuk realisasi per 31 Maret 2026 (Triwulan I) sebesar Rp.3.314.072.357 dengan persentase 21,71%.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Per IKU dan Efisiensi Anggaran SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Utama		Target	Capaian	Persentase Capaian (%)	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi
SK.1. Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten									
1	Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	6	8	120	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1.386.579.000	103.952.995	7,50	112,50
2	Jumlah kerjasama SUPM Waeheru di tahun berjalan (Kesepakatan)	1	-	0	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan	3.500.000		0,00	0,00
3	Jumlah pendidik SUPM Waeheru yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	1	-	0	Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	3.500.000		0,00	0,00
4	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Waeheru (%)	80	-	0	Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan	398.998.000		0,00	0,00
SK.2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)	86	100	100	Layanan Umum	450.000		0,00	100,00
6	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)	82	-	0	Layanan Umum	450.000		0,00	0,00
7	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)	85	-	0	Layanan Perkantoran	8.520.269.000	2.547.130.331	29,89	-29,89
8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Waeheru (Nilai)	71	-	0	Layanan Perkantoran	1.610.974.000	310.557.031	19,28	-19,28
9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)	77	100	120	Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik	3.337.758.000	352.432.000	10,56	109,44

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Utama		Target	Capaian	Persentase Capaian (%)	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi
10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	92,1	-	0	Layanan Manajemen Kinerja Internal	700.000		0,00	0,00
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	71,75	-	0	Layanan Manajemen Kinerja Internal	700.000		0,00	0,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				115	JUMLAH	15.263.878.000	3.314.072.357	21,71	93,29

Sumber : <https://myintress.kemenkeu.go.id> (Diakses pada tanggal, 15 Januari 2026)

D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya

SUPM Waeheru sebagai organisasi yang menyelenggarakan sektor pendidikan menengah dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Secara umum kinerja SUPM Waeheru pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) melalui pengukuran kinerja pada aplikasi kinerjaku KKP diperoleh sebesar 115, dimana dari target 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan secara keseluruhan sudah mencapai bahkan melebihi target. Adapun Nilai Efisiensi yang diperoleh sebesar 10,38, dimana angka tersebut menunjukkan dalam pelaksanaan anggaran 2025, seluruh kegiatan berjalan secara efektif dan efisien melalui optimalisasi perencanaan, pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja.



BAB IV

PENUTUP

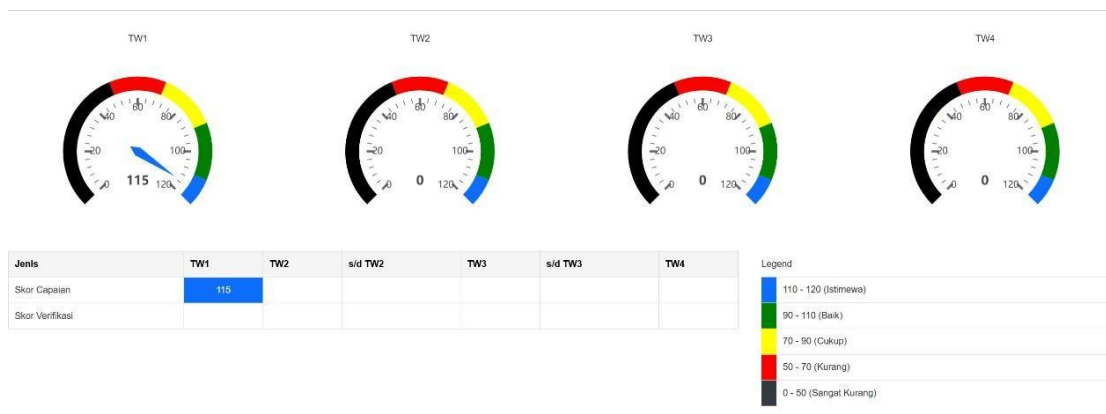
- A. Capaian Kinerja Utama
 - B. Permasalahan dan Rekomendasi
- 

BAB IV. PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, SUPM Waeheru memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi KKP melalui kegiatan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pemberian pelajaran dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan; pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler; pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa; pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, orang tua siswa, dan masyarakat; pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga perlengkapan.

Pada tanggal 06 Januari Tahun 2026 SUPM Waeheru telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala SUPM Waeheru dengan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sehingga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 (Dua) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Aplikasi Kinerjaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SUPM Waeheru pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 115 yang dapat dilihat pada dashboard aplikasi kinerjaku sebagai berikut.



Sumber Data : <https://kinerjaku.kkp.go.id> (Diakses pada tanggal 15 Januari 2026)

Gambar 10. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026

Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Triwulan I Tahun 2026

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1 Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	6	8	120
		2 Jumlah kerjasama SUPM Waeheru di tahun berjalan (Kesepakatan)	-	-	-
		3 Jumlah pendidik SUPM Waeheru yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	-	-	-
		4 Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Waeheru (%)	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)	86	100	100
		6 Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)	-	-	-
		7 Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)	-	-	-
		8 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Waeheru (Nilai)	-	-	-
		9 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)	77	100	120
		10 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	-	-	-
		11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	-	-	-

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja SUPM Waeheru telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasilkan tercapai secara optimal sesuai dengan realiasi Triwulan I Tahun 2026, target yang telah ditetapkan telah tercapai dengan baik sebanyak 1 IKU dan terdapat 2 (dua) IKU yang berstatus "**Istimewa**" sehingga sangat mempengaruhi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di Tahun 2026.

1. Permasalahan

Semua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2026 tercapai dengan baik bahkan berstatus Istimewa, hal ini disebabkan karena semua kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Walaupun seluruh target telah tercapai, namun ada beberapa permasalahan yang akan menghambat ketercapaian IKU di tahun selanjutnya yakni:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan TEFA sehingga dapat berpengaruh dalam pencapaian target PNBK;
2. Kurangnya pengawalan terhadap serapan lulusan, dan minimnya perusahaan budidaya perikanan di Prov. Maluku mengakibatkan lulusan budidaya belum terserap dengan baik;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian manajemen sekolah yang perlu diperhatikan dalam memenuhi dan meningkatkan proses penilaian akreditasi lembaga kedepan;
4. Perlu adanya peran aktif pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh instansi internal Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun instansi diluar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Rekomendasi

Keberhasilan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2026 tidak lepas dari pemantauan realisasi dan capaian kinerja secara berkala dari semua target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu direkomendasikan kepada penanggungjawab kegiatan untuk tetap melakukan pemantauan pencapaian pada target-target IKU kedepan.

Demikian laporan kinerja ini dibuat agar dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kegiatan SUPM Waeheru pada Triwulan I Tahun 2026. Harapan kami kiranya laporan ini dapat digunakan untuk melengkapi laporan-laporan yang telah disampaikan sebelumnya serta memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders SUPM Waeheru. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja SUPM Waeheru sekaligus sebagai bahan pertimbangan kedepan untuk membangun SUPM Waeheru yang lebih baik.

Lampiran



@SUPM_WAIHERU



humassupmwaiheru



supmwaiheru-kkp.sch.id



layanansupmwaiheru-kkp.id



supmwaiheruambon@yahoo.com



#GROWSTRONGER

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAEHERU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Abdul Azis Usemahu**

Jabatan : Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Alan Frendy Koropitan**

Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan KP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Kepala Sekolah Usaha Perikanan
Menengah (SUPM) Waeheru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Azis Usemahu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAEHERU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Lulusan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)	90
		2	Jumlah kerjasama SUPM Waeheru di tahun berjalan (kesepakatan)	1
		3	Jumlah pendidik SUPM Waeheru yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	1
		4	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Waeheru (%)	80
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)	86
		6	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)	82
		7	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)	85
		8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Waeheru (Nilai)	71
		9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)	77
		10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	92,1
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	71,75

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	4.344.639.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	10.520.241.000
Total Anggaran SUPM Waeheru Tahun 2026		14.864.880.000

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Azis Usemahu

Prepared by:

SUPM Waiheru

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kementerian Kelautan dan Perikanan

 (0911) 361111  supmwaiheruambon@yahoo.com  @SUPM_WAIHERU